

**DAFTAR BACAAN****Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Darma, Susilo Andi, *Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan dan Teori Keadilan*, 2013.
- Eliyana, “*Actio Pauliana dan Aspek Pidana dalam Kepailitan dalam Hubungannya dengan Tugas Kurator*”, Dalam: Emmy Yuhassarie (eds.), *Kewajiban Pailit dan standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Fauzi, M, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers, 2012.
- Jehani, Libertus, *Hak-hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Lotulung, Paulus Efendi, *Pencocokan Piutang*, dalam : Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Media, Jakarta, 2005.
- Muljadi, Kartini, “*Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*”, Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Prayoga, Andika, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Priambada, Komang, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja*, Alih Daya Publising Jakarta, 2008.
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Riza, Marwati, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, As Publishing, Makassar, 2009.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Tejaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Tumbuan, Fred B.G., *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- , “*Tujuan dan Wewenang Kurator Mengurus atau Membereskan Harta Pailit*”, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Jakarta, 2004.

Uwiyono, Aloyosius, Sri Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Yasar, Iftida, *Menjadi Karyawan Outsourcing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

-----, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Lembaran Negara Nomor 131 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

-----, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

### **Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Tanggal 17 Januari 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 Tanggal 11 September 2014

### **Jurnal**

Andre Azka Hanifan, “Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Pailit”, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei.

Christopher Ganadhi, Tanggung Jawab PPJP Sebagai Penerima Pekerja Outsourcing Dari PPJP Sebelumnya Apabila Terjadi PHK, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.

Kadek Agus Sudiarawan, Analisi Hukum Terhadap Pelaksanaan Outsourcing Dari Sisi Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016.